

**PENGARUH *ONE STOP SERVICE POLICY* TERHADAP
PENINGKATAN PENANAMAN MODAL
DI PROVINSI DKI JAKARTA
(Studi Kasus: Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta)**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial



YUHARIYATMONO

1151004099

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BAKRIE
JAKARTA 2019**

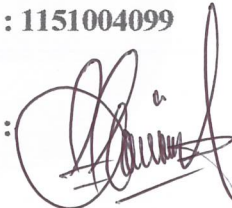
PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun rujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Yuhariyatmono

NIM : 1151004099

Tanda Tangan :



Tanggal : 5 Juli 2019

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini diajukan oleh:

Nama : Yuhariyatmono
NIM : 1151004099
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi :

**“Pengaruh *One Stop Service Policy* terhadap Peningkatan
Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta
(Studi Kasus: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta)”**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Univeritas Bakrie.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Insan Harapan Harahap, S.Sos., M.AP. ()

Penguji 1 : Prof. Rusadi Kantaprawira ()

Penguji 2 : Bani Pamungkas, SH., MSi., MPA. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 5 Juli 2019

UNGKAPAN TERIMAK KASIH

Segala puji serta syukur bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Tuhan seluruh alam, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang patut disembah Allah, yang maha hidup dan yang terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). Berkat limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh *One Stop Service Policy* terhadap Peningkatan Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta)”.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alahi wa Sallam* yang telah membawahkan kita keluar dari zaman kebodohan menuju kepada cahaya ilmu dan pengetahuan hingga saat ini.

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, yaitu ayahanda Suwarno, ibunda Mariaten, dan keluarga serta kerabat yang cinta, kasih, dan doa-Nya tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan bantuan, baik secara moril maupun materil sampai dengan saat ini dan akan datang.

Terselesainya tulisan ini, tidak terlepas dari kontribusi dan peran pihak-pihak lain yang mendukung segala keperluan penulisan ini. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu, diantaranya:

1. Ibu Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Bakrie.
2. Bapak Muhammad Tri Andika Kurniawan, S.Sos., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
3. Bapak Bani Pamungkas, SH., MSi., MPA., selaku dosen pembimbing akademik, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama menempuh perkuliahan.
4. Bapak Insan Harapan Harahap, S.Sos., M.AP., selaku dosen pembimbing skripsi yang memberikan nasehat, dukungan, dan sarannya dalam penelitian ini.
5. Segenap Narasumber: Ibu Indriyani Ekaningtiyas selaku Kepala Bidang Penanaman Modal dan Ibu Kiki Rizki Yunita Selaku Staf Seksi Pengendalian

pada Bidang Penanaman Modal DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Septy Viprianty M. Selaku Kepala Unit Pelayanan dan Bapak Yosevandi Franki Lambok Purba selaku Staf PNS UP PTSP Kecamatan Ciracas, Bapak Teguh P. Nugroho selaku Kepala Perwakilan Jakarta Raya Ombudsman RI dan Bapak Sugiharto dan Ibu Intan Indiyanti selaku investor dan masyarakat.

6. Ibu Muryani, Ibu Khuzaiman, dan Bapak Khairul Anam selaku guru dan pembimbing yang senantiasa memberikan nasehat dan semangat, baik secara moril maupun materil kepada penulis.
7. Ikkal Abdillah, selaku pementor yang memberikan nasehat agama dan motivasi kehidupan yang luar biasa untuk penulis.
8. Hari Rahmat Sra, Aziz Sentosa Setiana, Budiman Rahmad, dan Umar Abdul Aziz selaku sahabat dan kawan diskusi yang tidak pernah bosan untuk mendengarkan keluh-kesah dan memberikan solusi setiap permasalahan kepada penulis.

Akhir kata, *Jazakumullahu Khairan* atas dukungan, bantuan, dan doa yang diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, kajian-kajian dan penelitian terkait, dan dapat menjadi rujukan pemerintah dalam rumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi sebuah kebijakan yang lebih efisiensi dan efektif. Penulis sadar atas segala kekurangan dalam penulisan ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Jakarta, 5 Juli 2019

Yuhariyatmono

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bakrie, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuhariyatmono
NIM : 1151004099
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Tugas : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bakrie Hak Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh *One Stop Service Policy* terhadap Peningkatan Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta

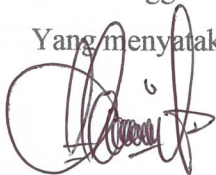
(Studi Kasus: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini, Universitas Bakrie berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta untuk kepentingan akademis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 5 Juli 2019

Yang menyatakan,



Yuhariyatmono

**Pengaruh *One Stop Service Policy* terhadap Peningkatan
Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta
(Studi Kasus: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta)**

Yuhariyatmono

ABSTRAK

Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengelola wilayahnya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu keikutsertaan pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta adalah upaya penerapan *one stop service policy* dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kebijakan tersebut terbentuk atas dasar 3 pilar yaitu pencegahan korupsi, perbaikan iklim investasi, dan perbaikan pelayanan publik. Penerapan *one stop service policy* merupakan perwujudan reformasi birokrasi dan *good governance* dalam rangka meningkatkan pelayanan pada perizinan dan non-perizinan dan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis dekriptif data primer dan skunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pelayanan perizinan dan non-perizinan dan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan RPJMD dan Renstra telah tercapai bahkan melebihi target dan berbagai upaya dilakukan untuk pemenuhan indikator-indikator kemudahan berbisnis menurut *World Bank* dalam memulai bisnis (*starting business*) dan izin pembangunan gudang (*dealing with construction permits*).

Kata Kunci: *One Stop Service Policy*, Penanaman Modal, dan *Good Governance*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
UNGKAPAN TERIMAK KASIH.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK DAN DIAGRAM	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
GLOSARIUM.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Batasan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.5.1 Manfaat Teoritis	11
1.5.2 Manfaat Praktik.....	11
BAB II TINJAUAN LITERATUR YANG BERKENAAN DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK.....	12
2.1 Konsep Reformasi Birokrasi	12
2.1.1 Definisi Birokrasi (<i>Bureaucracy</i>).....	13
2.1.2 Tipe Birokrasi Ideal.....	13
2.2 Teori Pelayanan Publik Berbasis <i>Good Governance</i>	14
2.2.1 Definisi Pelayanan Publik (<i>Public Service</i>)	15
2.2.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Menurut <i>United Nations Development Programe (UNDP)</i>	17

2.3 Konsep <i>One Stop Service</i> (OSS).....	19
2.3.1 Definisi <i>One Stop Service</i>	19
2.3.2 Model <i>One Stop Service</i>	20
2.4 Konsep Penanaman Modal.....	22
2.4.1 Definisi Penanaman Modal (<i>Investment</i>)	22
2.4.2 Indikator-Indikator Kemudahan Berbisnis Menurut <i>World Bank</i>	23
A. Memulai Usaha (<i>Starting a Business</i>).....	24
B. Izin Pembangunan (<i>Dealing with Construction Permits</i>)	25
2.5 Teori Evaluasi Kebijakan.....	26
2.5.1 Konsep Evaluasi Menurut William Dunn.....	27
A. Evaluasi Semu (<i>Psuedu Evaluation</i>).....	27
B. Evaluasi Formal (<i>Formal Evaluation</i>)	28
C. Evaluasi Teoritis (<i>Decision Theoritic Evaluation</i>)	28
2.5.2 Tipe Evaluasi Menurut William Dunn.....	28
2.6 Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT	
DIGUNAKAN UNTUK MEMPEROLEH DATA	32
3.1 Metode Penelitian.....	32
3.2 Objek Penelitian	33
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	33
3.3.1 Sumber Data.....	34
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.4 Instrumen Penelitian.....	34
3.5 Teknik Analisis Data.....	35
3.6 Pengujian Keabsahan Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	38
4.1 Penerapan <i>One Stop Service Policy</i> sebagai Perwujudan Pelayanan Publik	
Berbasis <i>Good Governance</i>	38
4.1.1 Sejarah dan Perkembangan <i>One Stop Service</i> di Indonesia	38
4.1.2 Penerapan <i>One Stop Service Policy</i> pada Dinas Penanaman Modal	

	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42
4.1.3	Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	45
	A. Visi, Misi, dan Motto.....	45
	B. Tujuan dan Sasaran	47
	C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	48
	D. Sumber Daya Manusia	52
4.1.4	Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	55
	A. Strategi dan Arah Kebijakan	55
	B. Program dan Kegiatan	59
	C. Anggaran Program.....	59
4.1.5	Permasalahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.....	60
	A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	61
	B. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong dalam Pencapaian Visi, Misi, dan Program	69
	C. Faktor Penghambat Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta ..	79
4.1.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.....	80
	A. Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan DPM PTSP Povinsi DKI Jakarta Tahun 2018 Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2017-2022	82
	B. Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.....	84
4.1.7	Argumentasi Penulis.....	88
4.2	Pengaruh <i>One Stop Service Policy</i> terhadap Peningkatan Penanaman	

Modal di DKI Jakarta.....	89
4.2.1 Penerapan Indikator-Indikator <i>Ease of Doing Business</i> (EODB) Menurut <i>World Bank</i> pada DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta	91
4.2.2 Dampak <i>One Stop Service Policy</i> terhadap Peningkatan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.....	104
A. Dampak Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan ...	104
B. Dampak Peningkatan Penanaman Modal	106
C. Penghargaan.....	113
BAB V PENUTUP.....	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Segitiga Pelayanan Publik.....	16
Gambar 2.2 Alur Pemikiran	31
Gambar 3.1 Siklus Penelitian Menurut Creswell	32
Gambar 3.2 Sistematika Penelitian	33
Gambar 4.1 Bagan Pilar, Turunan Peraturan, dan Penjelasan Terbentuknya OSS di Indonesia.....	41
Gambar 4.2 Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	50
Gambar 4.3 Peringkat dan Skor <i>Ease of Doing Business</i> (EODB) di Indonesia Tahun 2019	92
Gambar 4.4 Skor <i>Starting a Business</i> di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	93
Gambar 4.5 Skor <i>Dealing with Construction Permits</i> di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>The Five Good Governance Principles</i> Menurut UNDP	17
Tabel 2.2 Indikator-Indikator Kemudahan Berbisnis Menurut <i>World Bank Group</i> ..	23
Tabel 2.3 Indikator Memulai Bisnis (<i>Starting a Business</i>).....	24
Tabel 2.4 Indikator Izin Pembangunan (<i>Dealing with Construction Permits</i>)	25
Tabel 2.5 Tipe Evaluasi Menurut William Dunn.....	29
Tabel 3.1 Metodologi, Pengumpulan Data dan Analisis Data	36
Tabel 4.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai PNS PNS Berdasarkan Penempatan	52
Tabel 4.2 Rekapitulasi Jumlah Pegawai PNS Menurut Golongan di Lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	53
Tabel 4.3 Rekapitulasi Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Pendidikan di Lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.....	53
Tabel 4.4 Rekapitulasi Jumlah Pegawai PNS Non-PNS Berdasarkan Profesi	54
Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.....	56
Tabel 4.6 Anggaran Program DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018	59
Tabel 4.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	61
Tabel 4.8 Faktor Penghambat Penanaman Modal di DKI Jakarta	79
Tabel 4.9 Sasaran, Indikator Kinerja, dan target DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta tahun 2018	82
Tabel 4.10 Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dengan Realisasi Tahun 2017	84
Tabel 4.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	86
Tabel 4.12 Standar Perusahaan <i>Starting a Business</i> di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	94
Tabel 4.13 Jumlah SIUP dan TDP yang Diterbitkan DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.....	95

Tabel 4.14 Detail <i>Starting Business</i> di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.....	95
Tabel 4.15 Standar Gudang <i>Dealing with Construction Permits</i> di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	99
Tabel 4.16 Jumlah TDG yang Diterbitkan DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018	100
Tabel 4.17 Detail <i>Dealing with Construction Permits</i> di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	100
Tabel 4.18 Realisasi Invetasi PMA Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Sektor dan Proyek Tahun 2017	107
Tabel 4.19 Realisasi Invetasi PMDN Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Sektor Usaha dan Jumlah Proyek Tahun 2017.....	108
Tabel 4.20 Realisasi Invetasi PMA Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Sektor Usaha dan Jumlah Proyek Tahun 2018.....	110
Tabel 4.21 Realisasi Invetasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha dan Jumlah Proyek Tahun 2018	111

DAFTAR GRAFIK DAN DIAGRAM

Grafik 4.1 Prosedur, Waktu, dan Biaya <i>Starting Business</i> di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	97
Grafik 4.2 Prosedur, Waktu, dan Biaya <i>Dealing with Contruction Permits</i> di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.....	102
Grafik 4.3 Target dan Realisasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 s.d. 2018	107
Diagram 4.4 Realiasi Investasi PMA Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2018.....	109
Diagram 4.5 Realisasi Investasi PMDN Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2018.....	111
Grafik 4.6 Peringkat Ralisasi PMA Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Negara Tahun 2018	112

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan Kepala Bidang Penanaman Modal DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta	120
Lampiran II Transkrip Wawancara dengan Staf Seksi Pengendalian pada Bidang Penanaman Modal DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta.....	123
Lampiran III Transkrip Wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan PTSP Kecamatan Ciracas.....	125
Lampiran IV Transkrip Wawancara dengan Staf PNS Unit Pelayanan PTSP Kecamatan Ciracas.....	127
Lampiran V Transkrip Wawancara dengan Kepala Perwakilan Jakarta Raya Ombudsman RI	128
Lampiran VI Transkrip Wawancara dengan Masyarakat dan Invetor Pengguna Layanan <i>One Stop Service</i>	131
Lampiran VII Surat Rekomendasi Izin Penelitian	132
Lampiran VIII Surat Permohonan Permintaan Data di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta	133

GLOSARIUM

AFTA	: ASEAN <i>Free Trade Area</i>
AEC	: ASEAN <i>Economic Community</i>
AJIB	: Antar Jemput Izin Bermotor
Anjab/ABK	: Analisis Jabatan / Analisis Beban Kerja
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BKPM	: Badan Koordinator Penanaman Modal
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPLHD	: Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
BPTSP	: Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CRO	: <i>Customer Relation Officer</i>
DPM PTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
EODB	: <i>Ease of Doing Business</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IDR	: Indonesian Rupiah
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IT	: <i>Information technology</i>
Jakevo	: <i>Jakarta Evolution</i>
JIC	: <i>Jakarta Investment Center</i>
KPBDU	: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
KRK	: Keterangan Rencana Kota
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LKPM	: Laporan Kegiatan Penanaman Modal
Monev	: Monitoring dan Evaluasi
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak

NPPKP	: Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
ODS	: <i>One Day Service</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OSS	: <i>One Stop Service</i>
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
PAD	: Pendapatan Anggaran Daerah
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PHL	: Pekerja Harian Lepas
PJLP	: Pegawai Jasa Lainnya Perorangan
PM	: Penanaman Modal
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
P2B	: Pengawasan dan Penertiban Bangunan
PT	: Perseroan Terbatas
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RT/RW	: Rukun Tetangga / Rukun Warga
RTLB	: Rencana Tata Letak Bangunan
SAP	: <i>Simple Assesment Program</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLF	: Sertifikat Layak Fungsi
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
TOD	: <i>Transit Oriented Development</i>

UKL : Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup
UKPD : Unit Kerja Perangkat Daerah
UNDP : *United Nations Development Programe*
UP : Unit Pelayanan
UPL : Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UPPD : Unit Pelayanan Pajak Daerah